

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan isu keamanan baru yang muncul dalam realitas perpolitikan global. Isu terorisme sebagai isu kontemporer mulai muncul ketika peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat yaitu ketika teroris melakukan penyerangan gedung kembar World Trade Center (WTC) yang menyebabkan tewasnya 2753 korban jiwa¹ dan juga pentagon. Setelah peristiwa ini kemudian Amerika merespon dengan mengeluarkan kebijakan *war on terrorism* atau perang melawan terorisme. Melalui pidatonya di depan kongres dan seluruh rakyat Amerika pada tanggal 20 September 2001, Bush menyatakan akan menumpas habis jaringan terorisme global termasuk di dalamnya Al – Qaeda.²

Perang melawan terorisme adalah kampanye multidimensi seperti dimensi militer, intelejen, diplomatik, dan domestik. Dimensi

¹ Ashley Southall, "Man Killed in 9/11 Attacks Is Identified by DNA Testing" The New York Times

(<https://www.nytimes.com/2017/08/07/nyregion/9-11-victim-identified-by-dna-testing.html> diakses tanggal 20 Oktober 2017)

² Washington Post, "President Bush Address the Nation" The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html diakses tanggal 20 Oktober 2017)

militer yaitu terlibat perang-perang di Afghanistan, Iraq, dan operasi rahasia di Yaman. Dimensi intelijen terdiri reorganisasi kelembagaan dan peningkatan yang cukup besar dalam pendanaan dari Amerika pengumpulan intelijen kemampuan, program global menangkap tersangka teroris dan interning mereka di Teluk Guantánamo, diperluas bekerjasama dengan badan-badan intelijen Asing, dan pelacakan dan intersepsi pembiayaan teroris. Dimensi diplomatik termasuk melanjutkan upaya untuk membangun dan mempertahankan sebuah koalisi global organisasi dan negara-negara mitra dan diplomasi publik sebagai kampanye untuk melawan anti Amerika di Timur Tengah. Dimensi domestik AS perang melawan terorisme mensyaratkan antiterorisme undang-undang baru, seperti USA PATRIOT Act; lembaga keamanan baru, seperti Department of Homeland Security; penahanan preventif ribuan tersangka; pengawasan dan program-program pengumpulan intelijen oleh National Security Agency (NSA), Federal Bureau of Investigation (FBI) dan pemerintah daerah; memperkuat prosedur tanggap darurat; dan langkah-langkah peningkatan keamanan Bandara, perbatasan dan acara-acara publik.³

Perang melawan terorisme mendapat respon dunia global. Sentimen *islamophobia* atau

³ Richard Jackson, "War on terrorism" Encyclopedia Britannica (<https://www.britannica.com/topic/war-on-terrorism> diakses tanggal 20 Oktober 2017)

ketakutan terhadap islam pun meyebar luas. Acap kali pelaku terorisme adalah seorang muslim kemudian melekatkan cap teroris kepada muslim. Organisasi – organisasi dengan basis muslim militan seperti Al – Qaeda, IS, dan Taliban semakin menegaskan cap tersebut. Terlebih lagi IS atau Islamic State selalu menampilkan kekejaman dan kebrutalan yang sesungguhnya tidak mencerminkan nilai – nilai islam yang cinta dengan perdamaian. Negara – negara di timur tengah seperti Afghanistan, Iraq dan Suriah menjadi korban kebijakan ini. Dengan dalih memberantas organisasi ‘sarang teroris’ Amerika Serikat melegitimasi penyerangan ke negara – negara tersebut.

Indonesia pun tak luput dari tuduhan Amerika sebagai ‘sarang teroris’. Hamzah Haz wakil presiden Indonesia saat itu kemudian menepis tuduhan tersebut mentah – mentah, bahkan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh yang dalam pandangan AS di Anggap sebagai fundamentalis, seperti Ja’far Umar Thalib (Laskar Jihad), Habib Rizieq Syihab (FPI), dan Abu Bakar Ba’syir (MMI).⁴ Namun pendekatan humanis seorang wakil pemimpin negara kepada para pemimpin organisasi islam tersebut nyatanya tetap membuat AS ngotot bahwa tokoh – tokoh dari organisasi islam tersebut memiliki jaringan

⁴ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011

dengan terorisme global dan berbahaya bagi keamanan.

Di Indonesia aksi terorisme juga muncul silih berganti. Mulai dari tragedi Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002, Bom Hotel JW Marriot pada Agustus 2003, Bom di depan Kedutaan Australia tahun 2004, Bom Bali II tanggal 1 Oktober 2005, Bom Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton tanggal 17 Juli 2009, hingga tragedi bom bunuh diri di Kafe Starbucks dan penyerangan di kawasan Sarinah pada awal tahun 2016 dan bom bunuh diri di kampung melayu pada tanggal 24 Mei 2017. Aksi – aksi terorisme di Indonesia diduga dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah. Kelompok ini kerap kali dituduh menjadi pelaku aksi – aksi terorisme dan bom bunuh diri. Bom Bali I dan II, Bom di Kedutaan Australia, dan Bom JW Marriot diduga dilakukan oleh kelompok JI. Kemudian ketika *Islamic State* atau *IS* yang berpusat di Irak dan Suriah memimpin aksi terorisme global, aksi – aksi teror seperti Bom di Sarinah dan Bom kampung melayu diklaim dilakukan oleh jaringan IS di Indonesia. Terbaru adalah tragedi bom bunuh diri yang meledak di tiga gereja dan Mapolrestabes Surabaya pada tahun 2018.

Diperlukan strategi dan rumusan yang pas dalam penanganan dan pemberantasan terorisme di Indonesia. Revisi undang – undang tentang terorisme jangan sampai melupakan hak – hak

asasi dan mengedepankan humanisme dalam penanganan tindak terorisme. Dalam penangkapan pelaku terorisme juga harus disertai dengan asas profesionalisme dan keadilan yang dapat menimbulkan sentimen kebencian dan memunculkan bibit – bibit kebencian yang dapat menjadi teror baru dengan sasaran kepolisian. Pelaku – pelaku aksi teror di Indonesia mengatasnamakan islam sehingga peran ulama dan pemuka agama dalam memberikan pencerahan kepada jamaahnya sangat diperlukan. Penanganan dengan pendekatan yang manusiawi tanpa ada kebencian didalamnya dimungkinkan dapat menekan aksi – aksi terorisme di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengumpulkan berbagai data dan menuliskan hasilnya dalam “Strategi Pemerintah Indonesia dalam Membendung Terorisme Global tahun 2011 – 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut :

Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam membendung Terorisme global tahun 2011 – 2018 ?

C. Kerangka Berpikir **Konsep Counter – Terrorism**

Dalam skripsi ini dibutuhkan konsep dan strategi khusus untuk membendung terorisme global. Konsep *Counter Terrorism* atau Kontra Terorisme kiranya dapat membantu penulis dalam memahami upaya – upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam penanganan terorisme. Disini penulis menggunakan strategi kontra terorisme yaitu *Countering Ideological Support for Terrorism atau CIST*⁵. Strategi ini cukup relevan digunakan sebagai rujukan dalam pembendungan dan pemberantasan terorisme karena kedekatan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam isu terorisme.

Pendekatan utama dalam melawan ideologi terorisme atau CIST ini adalah untuk memperhitungkan perbedaan konteks, orientasi dan basis pada aliran – aliran kepercayaan yang berbeda. Dalam konteks ini, Amerika Serikat lebih menekankan tentang pertarungan ide kelompok moderat melawan ide kelompok ekstremis dalam islam.

Pendekatan ini dilakukan dengan menekankan pemberantasan terorisme mulai dari ideologi hingga penanganan pelaku teror di lapangan dengan tujuan terciptanya keamanan dan kebebasan bagi seluruh masyarakat dalam menjalani hidup. Menjadikan kehidupan seluruh manusia dalam kedamaian tanpa bayang – bayang ketakutan ancaman teror adalah hak

⁵ Anne Aldis dan Graeme P. Herd, *THE IDEOLOGICAL WAR ON TERROR*, New York, Routledge, 2007, hal: xvii

setiap manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, dilakukan strategi – strategi dalam CIST seperti; *Strategic counter terrorism, Operational counter terrorism, dan Resolving regional conflict*. Strategi ini berpedoman pada strategi yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Pertama, *strategic counter terrorism*. Strategi kontra terorisme ini bertujuan untuk melawan ideologi terorisme dengan metode – metode yang lebih *soft*. Strategi yang digunakan melalui Ideologi dengan paham ekstrimisme yang menjadi pedoman para pelaku terorisme dilawan dengan lebih sering dimunculkannya Islam yang lebih moderat. Pemahaman yang salah tentang islam harus diluruskan dan wajah islam yang cinta damai harus dimunculkan. Pemerintah dapat bekerjasama dengan media dalam mempromosikan dan menampakkan kemoderatan dan toleransi dalam beragama. Media yang kini bermacam – macam bentuknya dapat membantu dalam melawan terorisme dengan cara menampilkan kelompok – kelompok yang toleran dan moderat. Tujuan terorisme yang menimbulkan ketakutan, keresahan dan ketidakamanan dapat ditampilkan di media bahwa masyarakat bersatu dan tidak takut dengan terorisme

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam membendung ideologi dan pemahaman yang keliru dalam beragama. Melalui sekolah dapat ditanamkan dan dibentuk karakter seseorang dengan pemahaman

agama yang benar dan potensi munculnya pelaku terorisme dengan pemahaman islam yang salah ini dapat ditekan. Melalui kurikulum yang mengedepankan pendidikan karakter dan dibarengi dengan program Presiden Jokowi yaitu revolusi mental, sekolah menjadi agen penerus bangsa dengan melahirkan manusia – manusia Indonesia yang cinta damai. Melalui workshop – workshop dan seminar tentang bahaya terorisme dengan menampilkan data, fakta dan narasumber seperti mantan pelaku teror dan anggota kelompok terorisme dapat digunakan untuk mengajak dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa yang dilakukan oleh para teroris tersebut adalah salah dan membahayakan keberlangsungan kehidupan. Seminar – seminar tentang pemahaman nilai – nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan nilai – nilai luhur yang harus dihargai dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kerjasama antara Eksekutif dan Legislatif yaitu antara pemerintah dan DPR dalam mengatur payung hukum, yaitu undang – undang yang mengatur tentang tindak pidana terorisme merupakan langkah nyata dalam melindungi masyarakat baik korban maupun pelaku teror. Perancangan undang – undang tersebut tentunya tetap mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan, dan menjunjung tinggi nilai demokrasi.

Kedua, *Operational counter terrorism*. Strategi yang kedua ini dilakukan untuk membendung pergerakan terorisme dalam operasional mereka, sehingga dapat melemahkan sampai ke sel – selnya.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah melalui lembaga – lembaga terkait dapat memonitor terduga teroris, kolaborator, pendukung, dan simpatisan kelompok – kelompok radikal terorisme ini. Sinergitas antara Intelijen, TNI, BNPT, POLRI tentunya dibutuhkan agar kesuksesan dalam upaya *counter terrorism* dapat berjalan dengan baik. Apabila menggunakan cara yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat terdapat lima elemen dalam upaya operasional ini yaitu *security, military operations, humanitarian support, military to military contacts and conduct of operations*.

Kelima elemen tersebut merupakan langkah – langkah yang harus dilakukan untuk memutus jaringan ekstrimis terorisme dan membuat mereka tidak dapat bertahan. Dengan memahami budaya, ide, bahasa, dan kebiasaan musuh memudahkan dalam mengalahkan mereka. Mereduksi peran dan pengaruh pimpinan organisasi ekstrimis melalui operasi militer sehingga dapat memutus komunikasi, ide dan pesan dengan anggotanya. Operasi – operasi militer dan perencanaan strategi yang matang dalam mencegah aksi terorisme dapat meminimalisir dampak ‘teror’ yang membuat resah, ketakutan, dan menimbulkan korban jiwa. Selain operasi militer dilapangan, dalam era kemajuan teknologi ini juga dibutuhkan operasi dalam dunia maya. Ketika aksi terorisme sudah terjadi, bantuan operasi dapat dilakukan untuk melumpuhkan tindakan di lapangan yang menyangkut nyawa orang banyak. Bantuan kemanusiaan yang diberikan juga merupakan salah satu cara untuk

memutus pesan para ekstrimis teroris dalam melakukan aksinya. Strategi ini tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam hal pendanaan.

Ketiga, *resolving regional conflict*. Untuk menekan ancaman dari kekerasan politik dalam sistem internasional, komunitas internasional harus mengembangkan kapabilitas untuk mengakhiri konflik regional dengan cara negosiasi politik. Konflik regional di beberapa daerah seperti di Palestina, Iraq, Suriah, dan Afghanistan merupakan produsen terbesar kekerasan HAM, arus pengungsi, dan teroris. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia konflik regional juga dapat menjadi pemicu munculnya bibit – bibit terorisme. Konflik di Mindano, Filipina, Poso dan Maluku di Indonesia adalah konflik yang memberikan efek pada kemunculan aksi radikal. Sebuah pemikiran umum yang salah di Barat bahwa pihak yang bertikai pada waktunya akan kehabisan tenaganya sehingga akan berhenti sendiri terbukti salah ketika Al – Qaeda menyerang AS.

Indonesia dalam hal ini dan Komunitas internasional harus meningkatkan kapabilitas dalam mengakhiri konflik tersebut dengan cara negosiasi. Dengan metode mediasi dan diberikan ruang untuk diplomasi dan negosiasi dapat mereduksi ekstremisme ideologi dan ekstremisme politik. Sehingga para pelaku teror tersebut bisa bergabung ke dalam arus

utama politik dan mengakhiri konflik.⁶ Namun untuk mewujudkannya dibutuhkan pengetahuan yang relevan, alat yang membangun proses perdamaian dan alokasi dana yang cukup. Terorisme dapat muncul dengan motif ekonomi. Kekerasan yang muncul karena motif ekonomi dapat ditangani dengan investasi yang tepat.

D. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesa yang dapat diambil dari strategi pemerintah Indonesia dalam membendung terorisme global tahun 2011 – 2017 adalah menggunakan konsep *CIST (Countering Ideological Support for terrorism)* yang meliputi:

- a. *Strategic counter terrorism* yaitu melawan ideologi radikal dengan cara mempromosikan ideologi lebih moderat melalui media, pendidikan, seminar – seminar dan workshop bahaya laten terorisme dan melalui kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam mengatur payung hukum tentang terorisme.
- b. *Operational counter terrorism* yaitu menghentikan operasional terorisme melalui lembaga yang berwenang dengan dasar kelima elemen *security, military operations, humanitarian*

⁶ *Ibid, hal.125.*

support, military to military contacts and conduct of operations.

- c. *Resolving regional conflict* yaitu lebih mengedepankan ruang mediasi melalui diplomasi dan negosiasi dalam penyelesaian konflik dan memberikan kesempatan yang adil dalam menyamapikan hak – haknya. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan dengan investasi yang tepat diperlukan untuk menekan potensi kekerasan dan radikalisme.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah secara umum adalah untuk memenuhi tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan di jenjang strata satu, sedangkan secara khusus adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membendung terorisme global periode 2011 – 2017. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah informasi tentang strategi - strategi pemberantasan terorisme di Indonesia dalam penelitian – penelitian yang telah ada sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan dua metode

yaitu metode berbasis dokumen dan metode berbasis internet. Metode berbasis dokumen yang digunakan mengacu pada dokumen sekunder yang berbasis pada dokumen primer seperti buku – buku, literatur , dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Metode berbasis internet digunakan untuk menunjang dalam pengumpulan data karena dalam penelitian ini dibutuhkan informasi faktual berkenaan dengan topik yang penulis angkat.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam sebuah penelitian. Diberikannya batasan penelitian, bertujuan untuk memfokuskan penelitian ini pada aspek waktu dan permasalahan yang sedang dibahas. Sehingga penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar. Dalam penelitian ini, dibatasi hanya berfokus pada strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme global pada rentang tahun 2011 – 2017. Dimulai tahun 2011 karena pada tahun tersebut dibuatnya UU tentang intelejen yang baru hingga pada tahun 2017 dalam masa kepemimpinan presiden Joko Widodo.

H. Sistematikan Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari lima bab dan masing-masing bab termuat beberapa permasalahan sebagai berikut:

Bab I berisi ketentuan-ketentuan pokok dalam penyusunan skripsi yaitu latar belakang, pokok permasalahan, kerangka pemikiran/teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II penulis membahas tentang definisi, sejarah terorisme internasional dan perang melawan terorisme global.

Bab III penulis membahas tentang sejarah terorisme di Indonesia mencakup berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya sebagai pemicu, dampak dan tipe terorisme Indonesia.

Bab IV penulis membahas tentang strategi – strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membendung terorisme global tahun 2011 – 2018.

Bab V dalam bab terakhir skripsi ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah ada di bab – bab sebelumnya.